



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari
Telepon : (0986) 2217088; Faksimile : (0986) 2217087
e-mail : papua.barat@bpkp.go.id

NOTA DINAS
Nomor: OT.04/ND- 8/PW27.6/2023

Dari : Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta
Pembinaan APIP (P3A)
Kepada Yth. : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan APIP (P3A) Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/ 01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) Tahun 2022 Nomor OT.04/LPP-01/PW27.6/2022 tanggal 10 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

19 Januari 2023

Korwas Bidang P3A,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Robertus Gatot Megantoro





**LAPORAN KINERJA
BIDANG PROGRAM, PELAPORAN, DAN
PEMBINAAN APIP (P3A)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022**



Nomor : OT.04/LPP-01/PW27.6/2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2023



“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat
yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan.”

Steve Jobs

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	5
B. Struktur Organisasi	6
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	7
A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	9
B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022	16
C. Capaian Kinerja Lainnya	17
BAB 4 PENUTUP	18
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022	18
B. Rencana Tindak Tahun 2023	18
KILAS PERISTIWA BIDANG P3A TAHUN 2022	20

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan cascading dan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk seluruh Koordinator Pengawasan dan Kepala Bagian Umum.

Laporan Kinerja Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Koordinator Bidang Pengawasan P3A Tahun 2022.



Penyajian Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan kinerja Tahun 2022 Bidang P3A ini bisa memberikan manfaat bagi Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi kinerja dan menetapkan langkah strategis untuk peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun mendatang.

Korwas Bidang P3A

Ditandatangani secara elektronik

Robertus Gatot Megantoro



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja Bidang P3A merupakan Revisi Perjan Kinerja Perwakilan BPLP sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan yang ditetapkan dalam PKPT.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) mempunyai tupoksi memimpin, mengoordinasikan, mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan, penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil pengawasan serta program Pembinaan APIP (termasuk pembinaan jabatan fungsional auditor/JFA di lingkungan Perwakilan dan APIP Daerah).

Tugas Bidang P3A diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (5 tahunan) dan rencana kinerja perwakilan serta mengompilasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kegiatan Pengawasan Tahunan yang meliputi Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) berikut revisinya dari masing masing bidang Kelompok JFA dan Bagian.
2. Membuat kompilasi laporan berkala (bulanan) realisasi PKP2T dan PKAU dari masing-masing bidang Kelompok JFA dan Bagian.
3. Membuat kompilasi laporan bulanan Hasil Pengawasan.
4. Membuat laporan berkala dan kompilasi laporan kinerja triwulanan dari masing-masing bidang Kelompok JFA dan Bagian.
5. Menyusun laporan pelaksanaan RKT kompilasi.
6. Mengoordinasikan dan mempersiapkan bahan penyusunan LAKIP Perwakilan.

7. Memimpin pelaksanaan Pembinaan APIP di wilayah kerja Perwakilan.
8. Mengoordinasikan, mengarahkan dan mengelola sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan kebijakan JFA (peraturan, standar, dan pedoman serta sertifikasi JFA) di lingkungan APIP Daerah.
9. Mengevaluasi penilaian dan penetapan Angka Kredit JFA di lingkungan APIP Daerah.
10. Mengevaluasi penerapan JFA di lingkungan APIP Daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Bidang P3A dipimpin oleh Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPKP.

Saat ini Korwas Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh Robertus Gatot Megantoro sejak tanggal 3 Oktober 2021 berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-462/K/SU/2021 tanggal 6 September 2021.

Jumlah pegawai Bidang P3A per 31 Desember 2022 sebanyak 8 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	I Putu Alit Putrawan	Auditor Muda
2	Ratna Widyastuti	Auditor Pertama
3	Nina Andri Hanafiah	Auditor Penyelia
4	Wita Rosmalia Siahaan	Auditor Pelaksana
5	Muhammad Rizal Khoiruddin	Auditor Pelaksana
6	Vena Melynda S	Auditor Pelaksana
7	Christevano Dwi Putra Simbolon	Calon Auditor Pelaksana
8	A. Muh. Sultan Muwaffaq	Calon Auditor Pelaksana

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diformulasikan dalam visi BPKP, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran dari program strategis sesuai visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Visi dan misi serta tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020 – 2024. Program untuk menunjang kegiatan tersebut terdiri dari program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan program dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan tahun 2020 – 2024 terdiri dari 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (delivery) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (enabler). Rincian dapat dilihat pada Lampiran.

Dari 32 indikator kinerja kegiatan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2000 – 2024 yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Bidang P3A terdiri dari 2 (dua) IKK yaitu :

No	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengawasan						

No	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern pada K/L/P/BU						
	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Jumlah APIP	3	5	6	8	9
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja						
	Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai Skala 100	80	81	82	83	84

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menilai kegiatan pada tahun 2022, telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Korwas Bidang P3A sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP dengan Korwas Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Perjanjian Kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran kegiatan dengan menetapkan target indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memuat 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dan 1 sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja dukungan pengawasan (*enabler*) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	%	80
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1
	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kabupaten/Kota	2
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengumpulkan data kinerja yang merupakan capaian realisasi indikator kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, informasi yang mendukung/menghambat capaian kinerja, capaian realisasi dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan, upaya peningkatan kinerja ke depan.

Data kinerja yang diperoleh diharapkan menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, efisiensi, serta efektivitas.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	%	80	93,33	116,67%
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	100%
	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	2	2	100%
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	86,45	105,43%
	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	%	100	100	100%

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Uraian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Kegiatan - Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti

Indikator persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan proporsi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti

dibandingkan dengan rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh pengawasan BPKP.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tidak hanya penugasan yang bersifat assurance tetapi juga consulting. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, BPKP telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis. Rekomendasi strategis ini diartikan saran/rekomendasi yang bersifat kebijakan maupun implementasi prosedur yang memberikan nilai tambah/perbaikan bagi tata kelola instansi pemerintah daerah khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Realisasi persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah sebanyak 93,33% (14 dari 15 rekomendasi strategis) atau mencapai 116,67% dari target sebanyak 80%.

Selama tahun 2022 Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah memberikan rekomendasi strategis sebanyak 15 rekomendasi dan 14 rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu merekomendasikan untuk melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP sesuai Perban 8 Tahun 2021 dan menggunakan aplikasi PK APIP kepada 14 APIP di wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu merekomendasikan untuk mulai menggunakan aplikasi Sibijak dalam penyusunan dan penilaian angka kredit auditor pada Inspektorat Kabupaten Manokwari. Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan beberapa PKPT APP Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP dalam bentuk kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP dan Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2022.

2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern pada K/L/P/BU

a. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Capaian kinerja Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan realisasi 1 APIP Provinsi dari target 1 APIP Provinsi yaitu Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Indikator Kinerja jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dilihat dari kapabilitas APIP Provinsi yaitu Inspektorat Provinsi Papua Barat yang telah mencapai level \geq Level 3.

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Papua Barat yang telah mencapai kapabilitas APIP Level 3 dengan skor 3,000. Penetapan Level 3 tersebut dilaksanakan melalui tahapan penilaian sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu melalui tahap evaluasi jenjang I oleh Perwakilan BPKP sampai dengan jenjang II oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD).

Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, antara lain sebagai berikut:

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP

- 1) Workshop secara online terkait kebijakan penilaian kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan penilaian menggunakan aplikasi New PK APIP
- 2) Bimbingan teknis penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Papua Barat
- 3) Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Realisasi indikator kinerja jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas \geq Level 3 telah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%, Tercapainya kinerja ini juga didukung oleh komitmen dan upaya Inspektorat Provinsi Papua Barat dalam meraih kapabilitas APIP Level 3.

b. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Capaian kinerja Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 2 APIP Kabupaten/Kota dari target 2 APIP Kabupaten/Kota. Indikator Kinerja jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah mencapai level kapabilitas APIP \geq Level 3. Penetapan kapabilitas Level 3 dilaksanakan melalui tahapan penilaian sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penetapan Kapabilitas APIP Level 1 dan 2 dilaksanakan melalui evaluasi

jenjang I yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP, Level 3 melalui tahap evaluasi jenjang I sampai dengan jenjang II oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), dan untuk APIP yang telah memperoleh Level 3 s.d. Tahun 2021 Level 3 penilaian menggunakan Form Checklist Pemenuhan Minimal Kapabilitas APIP Level 3 sesuai Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor PE.11/S-686/D3/04/2022 Tanggal 26 Juli 2022.

Selama Tahun 2022 sebanyak 13 APIP Kabupaten/Kota telah melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) kapabilitas APIP.

Dari hasil PM atas 13 APIP Kabupaten/Kota telah dilaksanakan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

APIP Daerah Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas APIP Level 3 adalah:

- 1) Inspektorat Kabupaten Manokwari, yang memperoleh Level 3 pada tahun 2022 setelah melalui tahapan penilaian evaluasi jenjang I oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan evaluasi jenjang II oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD).
- 2) Inspektorat Kabupaten Sorong, yang memperoleh Level 3 pada tahun 2018 dan pada tahun 2022 dinilai kembali menggunakan Form Checklist Pemenuhan Minimal Kapabilitas APIP Level 3 sesuai Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor PE.11/S-686/D3/04/2022 Tanggal 26 Juli 2022.

Rincian Level Kapabilitas APIP terlampir.

Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, antara lain sebagai berikut:

Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP

- 1) Workshop secara online terkait kebijakan penilaian kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan penilaian menggunakan aplikasi New PK APIP.
- 2) Bimbingan teknis penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten/Kota;
- 3) Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada 13 Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator kinerja jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas \geq Level 3 telah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Tercapainya kinerja ini juga didukung oleh komitmen dan upaya Inspektorat Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dalam meraih dan mempertahankan kapabilitas APIP Level 3.

Seluruh realisasi indikator kinerja jumlah APIP dengan Kapabilitas \geq Level 3 termasuk Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota masih belum tercapai jika dibandingkan target Renstra tahun 2021 – 2024.

Tahun	Target	Realisasi
2020	3	1
2021	5	1
2022	6	2
2023	8	-
2024	9	-

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

- 1) Meningkatkan kerja sama dan mendorong komitmen pimpinan APIP Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dalam peningkatan kapabilitas APIP.
- 2) Mendorong dan membina APIP Daerah untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang mendukung kapabilitas APIP Level 3 seperti penerapan Manajemen Risiko (MR), Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), dan Audit Kinerja.
- 3) Mendorong APIP Daerah untuk mengalokasikan SDM yang kompeten dan menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi yang mendukung kegiatan pengawasan.
- 4) Mendorong APIP Daerah meningkatkan kualitas hasil pengawasan seperti melaksanakan pengawasan keuangan desa menggunakan aplikasi Siswaskeudes atau pelaksanaan kegiatan pengawasan secara join audit/evaluation
- 5) Monitoring pelaksanaan Area of Improvement (Aoi) atas hasil evaluasi Tahun 2022.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

a. Indikator Kinerja Kegiatan - Nilai SAKIP Unit Kerja

Indikator kinerja nilai SAKIP diperoleh dari nilai implementasi SAKIP melalui sistem penilaian mandiri dan evaluasi dari Inspektorat BPKP atas hasil penilaian mandiri tersebut. Penilaian implementasi SAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPKP.

Pada tahun 2022, nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat terealisasi sebesar 86,45 atau mencapai 105,43% dari target sebesar 82. Nilai ini merupakan hasil penilaian setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat atas penilaian mandiri tahun 2022.

Realisasi kinerja nilai SAKIP tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 4%

Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	+ / (-)	%
Nilai SAKIP Unit Kerja	83,38	86,45	3,07	4%

Nilai SAKIP tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 105,43% terhadap target nilai 82. Perkembangan capaian atas nilai SAKIP tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel

Tahun	Target	Realisasi
2020	80	-
2021	81	83,38
2022	82	86,45
2023	83	-
2024	84	-

Capaian kinerja yang cukup tinggi ini didukung antara lain:

- 1) Manajerial SDM dan anggaran yang cukup memadai;
- 2) Pelaksanaan penugasan didukung penggunaan aplikasi SIMA dan BISMA secara tertib;
- 3) Penyusunan *output* hasil pengawasa berupa Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) secara tepat waktu;

- 4) Pengukuran dan monitoring kinerja secara berkelanjutan melalui media eSakip dan aplikasi pendukung kinerja lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Bidang P3A dan seluruh Bidang dan Bagian Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

- 1) Meningkatkan upaya atas evaluasi program yang telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program.
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMA, e-SAKIP, BISMA, dan lain-lain.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam upaya meningkatkan kinerja Perwakilan terutama untuk indikator kinerja yang bersifat lintas bidang.

b. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Indikator kinerja persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) diukur dari persentase jumlah pelaksanaan tindak pengendalian dibandingkan dengan seluruh tindak pengendalian yang direncanakan (RTP) untuk mengendalikan risiko yang berada di atas selera risiko pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.

Pada tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 (empat) risiko. Atas risiko-risiko tersebut selanjutnya disusun sebanyak 6 (enam) Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengurangi kejadian/dampak risiko. Dan keseluruhan RTP tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2022. Realisasi kinerja persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah tetap seperti dalam tabel

.....

Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	+ / (-)	%
Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	100	100	0	- (tetap)

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2021 dan belum termuat dalam Rencana

Strategis Tahun 2020 – 2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maupun target Renstra Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian persentase penyelesaian RTP (MRI) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan dengan berbagai upaya penting antara lain:

- 1) Melibatkan semua bidang/bagian dalam melakukan identifikasi risiko sehingga seluruh risiko di Perwakilan teridentifikasi dengan baik.
- 2) Melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola kegiatan RTP dari setiap bidang/bagian sehingga jelas apa tanggung jawab masing-masing bidang/bagian tersebut.
- 3) RTP ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan memastikan pelaksanaannya sesuai rencana.
- 5) Penggunaan aplikasi Bewise untuk memudahkan monitoring implementasi MR.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 Bidang P3A dan Bidang lain serta Bagian Umum Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

- 1) Meningkatkan kompetensi pegawai terkait MR dalam bentuk Program Pelatihan Mandiri (PPM) maupun sosialisasi kebijakan terkini.
- 2) Menggali dan mengidentifikasi lebih dalam lagi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
- 3) Melakukan FGD dengan semua bidang/bagian untuk mendapatkan masukan terbaik dalam memitigasi risiko-risiko yang teridentifikasi.
- 4) Penggunaan aplikasi MR yang terbaru sebagai pengganti aplikasi Bewise yaitu aplikasi RMIS.
- 5) Mencatat setiap kejadian risiko dan melihat trendnya untuk memprediksi kemungkinan keterjadian dan dampaknya di masa depan.

B. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp354.864.053,00 atau 4,84% dari total anggaran Perwakilan sebesar Rp7.325.692.000,00.

Realisasi anggaran Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp353.864.053,00 atau terserap 99,81% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp354.531.000.000,00.

C. Capaian Kinerja lainnya (PKPT)

Selama tahun 2022 , Bidang P3A telah melaksanakan 3 PKPT dan telah menerbitkan 60 Surat Tugas. Per 31 Desember 2022 telah diterbitkan laporannya sebanyak 60 laporan atau 100% dari surat Tugas yang terbit.

Rincian output dari dari 3 (tiga) PKPT tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. PKPT APP - Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP

Output :

- a. Laporan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada beberapa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Laporan Evaluasi hasil PM Kapabilitas APIP pada 14 APIP di wilayah Provinsi Papua Barat.
- c. Laporan Perkembangan Peningkatan Kapabilitas APIP Triwulan 1 s.d 4 Tahun 2022.

2. PKPT - Bimtek Penerapan JFA , Implementasi SIBIJAK dan Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D

Output :

- a. Laporan Bimtek dan Evaluasi JFA pada Inspektorat Provinsi Papua Barat
- b. Laporan Bimtek Sibijak pada Inspektorat Kabupaten Manokwari.

3. PKPT - Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan (PAEP)

Output :

- a. Laporan Penilaian Mandiri Lakip Perwakilan Tahun 2022.
- b. Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Triwulan 1 s.d 3 Tahun 2022, dan LKj akhir tahun 2022.
- c. Laporan Hasil Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Laporan Gubernur) Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2022.
- d. Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko Triwulan 1 s.d Triwulan 4 Tahun 2022.
- e. Laporan Penilaian Mandiri Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2022.
- f. Laporan PP 39 (Realisasi Ouput) setiap bulan Januari s.d Desember 2022.
- g. Laporan Evaluasi PPM Triwulan 1 s.d Triwulan 4 Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tujuan yang dimandatkan oleh BPKP.

Laporan kinerja (LKj) ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2020- 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bidang P3A Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Bidang P3A Tahun 2022 yang telah ditetapkan, merupakan cascading dari Perkin Kepala Perwakilan yaitu sebanyak 4 Indikator Kinerja (IK) pada 3 sasaran kegiatan.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi target Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mencapai kinerja $\geq 100\%$, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,28%.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Tahun 2022 tidak hanya menjadi momen kebangkitan Bangsa Indonesia pasca Pandemi Covid-19, tapi secara khusus bagi Provinsi Papua Barat juga menjadi momen penting ditetapkannya provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga ke depannya, untuk sementara waktu wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melingkupi 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Perubahan-perubahan tersebut menjadi tantangan lebih untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk menunjang kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Menjalinkan kerja sama (MoU) dengan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan baik.
2. Meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama dengan mitra kerja (stakeholders) baik di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya melalui koordinasi dan sinergi
3. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Manajemen Risiko (MR);
4. Mendorong pemerintah daerah meningkatkan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
5. Mendorong APiP Daerah meningkatkan kapabilitas APiP;

6. Mendorong APIP Daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM pengawasan melalui jalur sertifikasi JFA maupun substansi pengawasan;
7. Meningkatkan kompetensi SDM Perwakilan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengawasan;
8. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut atas saran/rekomendasi/Area of Improvement (AOI) atas hasil pengawasan BPKP.

KILAS PERISTIWA BIDANG P3A TAHUN 2022



Sosialisasi mengenai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilias APiP kepada Inspektorat di lingkungan Provinsi Papua Barat melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Sosialisasi oleh Bidang P3A ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi awal mengenai kegiatan Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (PK APiP) bagi masing-masing inspektorat. (21/04/2022)



Selain melakukan sosialisasi, Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat juga melakukan Bimbingan Teknis mengenai PK APIP kepada Inspektorat-inspektorat Daerah seperti kepada Inspektorat Kabupaten Kaimana (18/05/2022), Inspektorat Kabupaten Raja Ampat (23/05/2022), Inspektorat Kabupaten Fakfak (23/06/2022), Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan (06/07/2022), serta Inspektorat Daerah lainnya. Bimtek tersebut menyampaikan penggunaan aplikasi PK APIP untuk penginputan data Profil APIP setiap triwulan dan Penilaian Mandiri PK APIP yang akan dilakukan setiap tahun.



Bimbingan Teknis mengenai penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) yang diselenggarakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Manokwari. (19/05/2022)



Pembukaan Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Sorong yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Manokwari pada tanggal 20 Juni - 12 Juli 2022. (20/06/2022)



Ekspose Panel pada Tingkat Evaluator Jenjang I atas Hasil Penilaian Mandiri PK APIP oleh Tim Inspektorat Kabupaten Manokwari (03/10/2022), Tim Inspektorat Provinsi Papua Barat (07/10/2022), dan Tim Inspektorat Kabupaten Sorong (29/11/2022) di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Tim panel Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam kesempatan ini memberikan beberapa tanggapan kepada Inspektorat Daerah untuk memperbanyak penugasan terkait assurance maupun consulting atas *Governance, Risk, and Control (GRC)* serta mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Daerah.



Ekspose Panel PK APIP oleh Tim Inspektorat Kabupaten Manokwari dan Tim Inspektorat Provinsi Papua Barat didampingi tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di Swiss-Belhotel Makassar. Ekspose yang juga dihadiri oleh Ibu Nina Ulina Kartika Nasution sebagai Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ini merupakan salah satu syarat bagi Inspektorat Daerah menuju pencapaian skor level 3 dalam Penilaian Kapabilitas APIP. (08/11/2022)



Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan pembahasan hasil sementara Evaluasi Penerapan JFA pada Inspektorat Provinsi Papua Barat (15/11/2022)



Bimbingan Teknis oleh Tim dari Bidang P3A Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengenai penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) untuk pengawasan Dana Desa kepada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni. (07/12/2022)

